

Hubungan Anggota DPR dan Konstituen Pemilih Pasca Pemilu Tahun 1999 : Dilema Representasi Politik Indonesia = Member of Parliament's Constituent Relationship Post General Election 1999 : A Political Representation Dilemma

Yopi Fetrian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82095&lokasi=lokal>

Abstrak

Tulisan ini muncul untuk meneliti penyebab dari ketidakpuasan rakyat terhadap hasil kerja anggota dewan proses Pemilu 1999. Anggota dewan sebagai produk dari sistem politik yang telah mengalami pembaharuan tentu diharapkan dapat memiliki kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Kekecewaan dan rakyat tentu menjadi menarik untuk diteliti guna menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini hendak menjelaskan pertanggungjawaban anggota dewan akibat penggunaan sistem Pemilu proporsional pada Pemilu 1999. Konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional yang telah menempatkan partai mengantarai hubungan anggota dewan dengan rakyat tentu perlu dianalisis secara lebih lanjut.

Tujuh orang anggota DPR yang diwawancarai secara mendalam sebagai narasumber utama dipilih secara purposif berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat. Dan analisis terhadap informasi yang diperoleh, anggota dewan dapat dikategorikan sebagai agen dari partai atau agen dan rakyat.

Analisis secara kualitatif terhadap temuan dengan menggunakan pendekatan pnsipafagen, didapatkan bahwa partai maupun konstituen sebagai prinsipal tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota dewan sebagai agen. Partai lemah kemampuannya tidak saja karena baru terbentuknya organisasi partai, tapi juga disebabkan karena tidak dimilikinya hak recall partai terhadap anggota dewan sementara rakyat pun masih belum rasional dalam memilih. Hanya saja pertanggungjawaban anggota dewan kepada rakyat lebih lemah lagi karena adanya partai sebagai perantara.

<hr><i>This research has tried to look for the reason why the people discontent at the performance of 1999 elected MPs. MPs that have elected from the reforming political system expected will be more accountable. MPs discontenting performance important to be researched what factor triggers these.

This research intent to explain MPS accountability that has constructed by proportional election system used in 1999. The consequences of proportional election system, which place party intermediating MPs relationship to their constituent needed to be studied further.

Seven samples have been selected as resource person. They were chosen from West Sumatra Province and West Java Province purposively. After analyzing the Information, we could categorize MPs into two parts; one part perceived their existent as party agent, and the other as people's agent.

Qualitative analysis to the finding which using principal-agent theory provide us conclusion that, both of party and constituent as principal did not have effective competence to inquire MPs accountability as their

agent. Political parties have weaknesses coming from their uninstitutionalized organization moreover recalling privilege does not belong to party, while constituents not yet are rational. However, even worse because of fluid part is in between.</i>